

BAB V

KESIMPULAN

Sebelum dipimpin oleh Erdogan, Hubungan Turki dengan NATO, dan Uni Eropa bisa dikatakan sangat dekat. Turki berusaha mendekat menjadi lebih demokratis. Turki menjadi anggota NATO sejak tahun 1952, tiga tahun setelah NATO resmi didirikan. Turki yang saat itu mengalami konflik territorial dengan Rusia akhirnya menggiring Turki pada pilihan menjadi anggota NATO. Tak hanya menjadi anggota, Turki juga merupakan salah satu anggota yang memiliki banyak peran untuk NATO sendiri. Militer Turki merupakan militer terbesar kedua di NATO setelah Amerika Serikat. Selain itu, Turki juga berpartisipasi dalam *The Partnership for Peace Training Center* dan menjadi salah satu *host* dari lima markas NATO yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan operasi besar pasukan darat di kota pelabuhan barat Izmir.

Upaya Turki dalam menjadi anggota Uni Eropa juga tidak kalah gigih. Turki yang sudah mendaftar menjadi anggota *European Economic Community* (EEC) pada tanggal 31 Juli 1959, akhirnya mengajukan diri untuk menjadi anggota penuh pada 14 Maret 1987. Jalan terjal menuju pembicaraan akses sebagai anggota Uni Eropa seperti tak berujung. Ada berbagai syarat seperti *Copenhagen Criteria* ataupun masalah bilateralnya dengan Siprus ikut menjadi hambatan Turki menjadi anggota Uni Eropa. Turki mereformasi Undang-Undangnya sehingga banyak yang mengatakan reformasi yang dilakukan Turki adalah *silent revolution*. Walaupun begitu, sepertiny Turki

masih menunggu lebih lama dari 30 semenjak pengajuan diri menjadi anggota Uni Eropa.

Saat Recep Tayyib Erdogan terpilih dan menjadi Perdana Menteri di Turki, atribut-atribut keislaman diberlakukan kembali. Timur Tengah telah menempati tempat yang semakin signifikan dalam kerangka kebijakan luar negeri Turki sejak berdirinya Republik. Titik balik dalam hal hubungan Turki-Timur Tengah sebenarnya ada di kebijakan luar negeri rezim AKP. Turki menerapkan kebijakan *zero problem with neighbor* yang memberikan arti penting di negara-negara Timur Tengah terutama di negara Islam. Keterpihkan Turki terhadap Israel yang dahulu tinggi sekarang semenjak Erdogan, Israel justru disalahkan dalam penyerangan Palestina. Turki mendukung kemerdekaan Palestina.

Sementara itu, semenjak April 2011, pecah konflik di Suriah dan rakyat sipil menjadi korban dari konflik Saudara tersebut. Pilihan utama mereka adalah Turki karena Turki menawarkan *Open Door Policy* untuk para pengungsi dan menjadi jembatan untuk mereka menyeberang ke Uni Eropa. Turki, menjadi negara dengan penerima pengungsi terbanyak, sekitar hampir dua juta pengungsi di Oktober 2013. Pada awal konflik, pengungsi Suriah dianggap tamu daripada pengungsi legal, namun sejak akhir Oktober 2011 Turki memberikan status proteksi “sementara”. Ini untuk memberikan kepastian agar tidak ada pengembalian paksa dan tidak ada batasan waktu tinggal untuk para pengungsi di Turki. Sedangkan di negara Timur Tengah yang lain, Libanon, Yordania, Irak dan Mesir juga menjadi destinasi

pengungsi mencari keamanan. Meski respon yang didapat tidak seramah Turki yang menerapkan *Open Door Diplomacy*.

Pengungsi yang berada Turki menyeberang ke Uni Eropa dan sampai ke Yunani ternyata memiliki respon yang berbeda dibandingkan ketika di Turki. Kebanyakan dari negara Uni Eropa tersebut terkesan tidak menerima para pengungsi dan kewalahan dalam mengatasi pengungsi. Maka dari itu, akhirnya para petinggi Uni Eropa akhirnya mengadakan pertemuan KTT di Brussel pada Maret 2016 untuk sama-sama menemukan solusi mengatasi pengungsi. Muncullah ide untuk mengajak Turki untuk bekerja sama mengatasi pengungsi. Awalnya menolak, namun Turki akhirnya sepakat untuk bekerja sama dengan Uni Eropa pada 20 Maret 2016. Butir-butir kesepakatan tersebut pada intinya terdiri dari sembilan butir.

Yang pertama mengenai pernyataan perlindungan pengungsi yang terdaftar di Uni Eropa, yang kedua mengenai mekanisme pengembalian pengungsi dari Yunani ke Turki, yang ketiga mengenai Turki yang akan memproteksi jalur pengungsi ke Uni Eropa, yang keempat mengenai pendaftaran pengungsi oleh Uni Eropa, yang kelima mengenai pemenuhan visa Schengen untuk masyarakat Turki dengan bersyarat, yang keenam mengenai pengalokasian dana 3 Milyar Euro kepada Turki untuk pemenuhan fasilitas pengungsi, yang ketujuh mengenai kerja sama Turki-Uni Eropa terkait Unit Bea Cukai, yang kedelapan mengenai percepatan proses akses Turki dalam keanggotaan Uni Eropa dengan membuka bab 33, dan yang terakhir mengenai Uni Eropa akan membantu Turki dalam memperbaiki

kondisi di wilayah yang berbatasan langsung dengan daerah konflik Suriah di Turki

Alasan mengapa Turki sepakat dengan kerja sama dengan Uni Eropa dalam penanganan imigran bisa dibuktikan dengan Model Aktor Rasional milik Graham T. Allison. Graham menerangkan bahwa kebijakan luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional, terutama pemerintahan yang monolit, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Kebijakan luar negeri adalah optimalisasi hasil dari kalkulasi untung-rugi yang diperoleh Turki dengan adanya kesepakatan tersebut.

Alasan yang pertama adalah mengenai peluang Turki untuk dinegosiasikan lebih lanjut sebagai calon anggota Uni Eropa. Seperti yang kita tahu sudah sekitar 30 tahun Turki menantikan kepastian untuk menjadi anggota Uni Eropa. Uni Eropa yang ikut menjanjikan hal ini ke dalam butir perjanjian tentu saja menarik Turki untuk benar-benar menyepakati perjanjian tersebut. Uni Eropa menjanjikan untuk membuka chapter 33 pada *Copenhagen Criteria*. Ahmet Davutoglu Perdana Menteri Turki menyambut baik kerja sama ini

Alasan yang kedua adalah keuntungan ekonomi pada janji akses visa Schengen untuk warga negara Turki. Warga negara Turki sudah mengalami kesulitan untuk mengurus visa Schengen sejak lama. Visa Schengen yang mudah diakses oleh negara Eropa non Uni Eropa tidak dirasakan oleh Turki yang sudah dekat dan juga negara yang menjadi mitra bisnisnya. Berbicara mengenai ekonomi, tentu saja adanya visa Schengen ini berpengaruh pada

ekonomi Turki. Data menunjukkan bahwa ekspor dan investasi Turki terbanyak berada di negara-negara Uni Eropa. Dengan adanya visa Schengen yang nantinya dipenuhi, maka semakin banyak investasi maupun kegiatan bisnis yang bisa dilakukan oleh para pelaku ekonomi dan pebisnis. Ini akan memberi manfaat kepada kondisi ekonomi Turki berkaitan dengan kemakmuran negara Turki.

Alasan yang ketiga yakni Uni Eropa yang akan membantu Turki dalam menjaga perdamaian dan pengungsi di perbatasan Suriah dan Turki. Keadaan perbatasan yang memilukan di perbatasan Turki-Suriah pada 2012 adalah banyaknya pengungsi yang masih terlantar dan berada di kamp-kamp yang masih rentan terhadap kerusakan. Tenda yang mudah roboh terhadap angin ataupun makanan yang tidak layak. Ditambah lagi ancaman bahwa bom dan konflik bisa melebar ke wilayah Turki dan membahayakan bagi pengungsi maupun warga Turki. Turki sudah menerapkan sebuah sistem yang dikenal sebagai “titik nol pengiriman”. Sistem ini adalah pengiriman bantuan kepada para pengungsi di perbatasan. Walaupun begitu, ini tak akan bisa menghindarkan Turki dari ancaman konflik yang melebar. Maka dari itu, kalau Uni Eropa ikut andil dalam penjagaan perbatasan Turki-Suriah, ini akan meringankan beban Turki dalam penanganan pengungsi.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka keputusan Turki sepakat dalam penanganan imigran dengan Uni Eropa dirasa rasional. Model aktor rasional Graham T. Allison membuktikan bahwa keputusan yang dibuat Turki rasional. Jadi, mengapa Turki lebih bekerja sama dengan Uni Eropa, tentu saja Turki sebenarnya masih ingin menjadi anggota Uni Eropa.